Penentuan

Sambungan hal 1

Dampaknya proses persiapan pelaksanaan haji seperti pengadaan akomodasi, katering, hingga transportasi lebih terakselerasi. "Sehingga kita bisa memperbaiki layanan di Armina (Arafah Muzdalifah Mina), " jelasnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai, perubahan kebijakan mengenai Masyair merupakan sebuah *challange* atau tantangan yang harus dijawab. "Pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji menyampaikan siapa yang menyelesaikan proses administrasi lebih dulu, dia yang akan pilih posisi maktab (di Mina dan Arafah). Nah ini juga menjadi tantangan bagi Kemenag," ucapnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imamsyah mengatakan pengumuman kuota haji 1445 H/2024 M lebih awal akan memberikan banyak waktu dalam penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. "Hal ini diharapkan akan memberikan banyak ruang untuk penentuan BPIH yang pada gilirannya ada banyak waktu untuk persiapan penyelenggaraan haji, termasuk perkiraan biaya akomodasi, transportasi dan katering," ujar Fadlul. **(Ati/Ant)-f**

Endar

Sambungan hal 1

Endar tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/7) sore menggunakan kendaraan dinas Polri jenis Mazda 6 berkelir abu-abu. Saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Endar disambut tepuk tangan puluhan pegawai KPK yang telah menunggu kedatangan perwira tinggi Polri berbintang satu tersebut. Setelah bersalaman dengan sejumlah pegawai KPK tersebut, Endar pun masuk ke dalam Gedung dengan didampingi oleh puluhan pegawai KPK tersebut.

Endar yang mengenakan kemeja putih dan dasi merah, juga memperlihatkan sebuah amplop surat perintah penugasannya di KPK kepada awak media. **(Ful)-f**

ANOC

Sambungan hal 1

Kami masih berkomunikasi. Yang jelas, NOC Indonesia akan terus bekerja dan saat ini kami telah mengagendakan kegiatan yang bisa mendapatkan eksposur untuk olahraga Indonesia," tambahnya.

Terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyesalkan batalnya ANOC World Beach Games tersebut. "Pemerintah turut menyesalkan pembatalan ANOC World Beach Games yang sejatinya mampu meningkatkan gairah ekonomi lokal pascapandemi Covid-19," katanya. **(Ant/Has)-d**

UU Desa

Sambungan hal 1

Sudah menjadi ëbawaan genetikí bahwa UU Desa akan selalu lekat dengan ëkomoditas politikí. Sebagaimana kelahirannya tahun 2014 yang juga merupakan tahun politik, revisi UU Desa pun tidak bisa dilepaskan dengan pesta demokrasi 2024 mendatang. Misinya adalah sama-sama untuk meraup suara pemilih di pedesaan, sehingga revisi UU Desa dapat menjadi bekal untuk kampanye partai politik (parpol). Dugaan tersebut tidak berlebihan karena sejumlah Kades mengklaim akan ëmenghabisií suara parpol yang menolak tuntutan mereka.

Salah satu poin krusial yang disepakati Baleg DPR yang perlu kita kawal bersama hingga disahkannya revisi UU Desa yakni usulan perpanjangan masa jabatan Kades yang dulunya 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali, menjadi 9 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali. Meskipun sama-sama berjumlah 18 tahun, tetapi bentuk masa jabatan yang demikian telah mereduksi mekanisme evaluasi masyarakat Desa dan menangguhkan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas Kades.

Anomali lain, yakni perpanjangan masa jabatan tersebut justru langsung diberlakukan kepada Kades yang aktif menjabat setelah revisi UU Desa disahkan. Memperpanjang masa jabatan Kades aktif jelas akan mengancam independensi Kades dan menyempurnakan preseden buruk di samping perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Praktik perpanjangan masa jabatan kepada pejabat aktif seakan menjadi senjata para politisi untuk mengkonsolidasi kepentingan di 5 tahun belakang.

Ketika jabatan seseorang melebihi batas sewajarnya, tentu dikhawatirkan akan berpotensi menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya (*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*). Apabila perpanjangan masa jabatan Kades ëdiketokí DPR dan Presiden, maka ke depan masyarakat Desa harus benar-benar memilih Kades secara matang bukan untuk kepentingan sesaat. Sehingga, Kades yang terpilih benar-benar merupakan pemimpin masyarakat Desa yang kompeten, akuntabel, dan memang lahir dari rakyat.

Poin mendesak lain tetapi justru luput dalam pembahasan Baleg DPR yakni penguatan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan dan fungsi BPD di banyak Desa saat ini masih belum tercium taringnya. BPD yang diharapkan menjadi kolega pemerintah Desa dan wakil rakyat di desa justru hanya menjadi ëpenggembira dan pelengkap nestapaí. Tidak sedikit yang menyebut BPD sebagai ëtukang stempelí.

Impian BPD sebagai kolega pemerintah Desa rasanya terlampau tinggi apabila melihat pengaturan BPD di UU Desa yang sangat minim. Bahkan aturan mengenai hak BPD di UU Desa hanya diatur dalam 1 Pasal yang terdiri dari 3 poin. Hal ini berbanding terbalik dengan tugas yang dibebankan kepada BPD yang amat berat. Dengan demikian, perlu niat baik pembentuk undang-undang dalam merevisi UU Desa yang tidak hanya fokus terhadap penguatan Kades. Tetapi Desa secara keseluruhan salah satunya yakni BPD.

Penguatan BPD di dalam revisi UU Desa dapat dilakukan dengan penambahan pengaturan: a) sarana pendukung kerja BPD; b) pendapatan atau tunjangan anggota BPD; c) instrumen kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya. Seperti hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, bahkan juga hak angket sebagaimana dimiliki DPR dan DPRD.

(*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi)-f*

Sleman

Sambungan hal 1

Ini adalah pencapaian kita bersama, dan mari kita jadikan sebagai motivasi dan kekuatan bagi kita untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Sleman," ujar Bupati.

Untuk pencapaian tersebut, Pemkab Sleman telah menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting.

"Kami juga mempresentasikan pokok kegiatan dan capaian program terkait pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana," tambah Bupati.

Sementara Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, penganugerahan tanda penghargaan bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting diarahkan untuk mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju. Dengan tersedianya SDM berkualitas, dikatakan Hasto akan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan bangsa.

"Perlu diingat, capaian ini baru dalam rangka menciptakan pembangunan fisik saja. Secara fisik dinilai sehat, namun pembangunan jiwa dan raga juga perlu diperhatikan. Kami harap platform pembangunan percepatan stunting ini menjadi bagian dari rangka pembangunan manusia sepenuhnya. Baik dari segi fisik maupun karakternya," jelasnya. **(Has)-f**

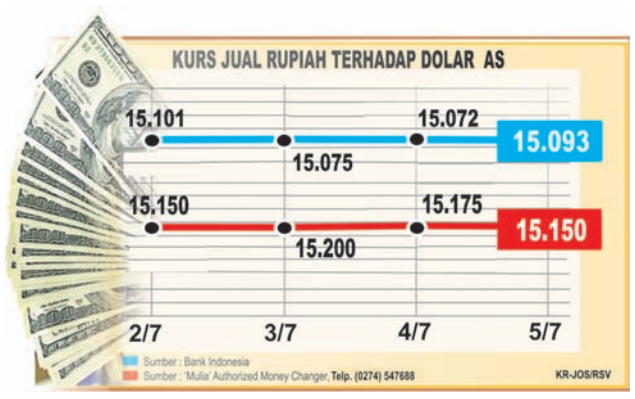

Prakiraan Cuaca — Kamis, 6 Juli 2023

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

KELOLA PENDAFTAR HAJI

BPKH Apresiasi Bank BPD DIY Syariah

YOGYA (KR) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan apresiasi kepada Bank BPD DIY Syariah dalam mengelola dana dan pendaftaran calon jemaah haji DIY. Hal itu disampaikan Dewan Pengawas dan Komite Manajemen Risiko BPKH dalam kunjungannya ke Kantor Pusat Bank BPD DIY saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penempatan pengelolaan dana haji.

KR-Istimewa

Dewan Pengawas dan Komite Manajemen Risiko BPKH saat berkunjung ke Kantor Pusat Bank BPD DIY.

Secara keseluruhan BPKH memberikan penilaian bagus kepada Bank BPD DIY Syariah dalam mengelola dana haji dan telah memenuhi ketentuan serta kategori tingkat risiko rendah (low risk).

"Kami terus melakukan monitoring kepada semua bank pengelola dana haji agar senantiasa memenuhi prinsip-prinsip governance dalam pengelolaanya, termasuk Bank BPD DIY Syariah bagus," kata Anggota Dewan Pengawas BPKH Dr Mulyadi, Rabu (5/7).

Monev dihadiri pula Anggota Dewan Pengawas BPKH Dr Rojikun dan Dr Deni Suardini beserta tim yang diterima jajaran Direksi PT Bank BPD DIY. Direktur Utama Bank BPD DIY Drs Santoso Rohmad MM menyampaikan terima kasih atas kepercayaan BPKH yang telah menunjuk Bank BPD DIY Syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan melakukan pengelolaan dana dengan baik. "Tentunya hasil ini akan terus kami pertahankan sehingga masyarakat DIY akan melakukan pendaftaran ibadah haji melalui Bank BPD DIY," ujamya.

Pada kesempatan lain, Tim Monev BPKH yang dipimpin Khairiansyah Salman, Ahmad Zaky dan Dyah Rahayu menyampaikan harapan agar Program Gerakan Haji Muda terus didorong melalui inovasi kegiatan di masyarakat. **(Ria)-d**

Laka

Sambungan hal 1

Toyota Innova Reborn H 1772 GZ bagian belakang dan depan ringsek, Toyota Innova Reborn AB 1379 OY bagian belakang dan depan ringsek. Isuzu Pick Up AB 8738 AA lampu belakang sebelah kiri terlepas, Honda Freed AD 1293 CL kaca belakang pecah, Honda HRV AB 60 EY bember belakang ringsek.

Tercatat identitas pengemudi bus Suroto (47) warga Jambi, pengemudi Toyota Innova Reborn AB 1364 PX, Al Qomar Adi Iswanto (42) Pakuncen Yogyakarta. Pengemudi Toyota Avanza AB 1691 HA, Sawal (69) Ngaglik Sleman. Pengemudi Toyota Innova Reborn H 1772 GZ, Yonas Dedi Prasetyo (37) Prambanan Klaten.

Pengemudi Toyota Innova Reborn AB 1379 OY, Suwarjito (52) Ngemplak Sleman. Pengemudi Isuzu pick Up AB 8738 AA, Budi Wasanto (39) Semanu Gunungkidul. Pengemudi Honda Freed AD 1293 CL, Giran Ayuningsih (35) Klaten. Pengemudi Honda HRV AB 60 EY, Yusup Priyo Hartono (55), Penembahan Kraton Yogya. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kejadian dan akan mendatangkan teknisi. **(Jdm)-f**

PENGUMUMAN

Dengan segala kerendahan hati saya HARTONO menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Klaten bahwa saya pernah terlibat pasal 170 KUHP Sub 181 KUHP dan Pasal 167 ayat (2) KUHP serta dijatuhi hukuman pidana. Dan telah selesai saya jalani di Lembaga Permasyarakatan Klaten. Dan saat ini saya akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klaten Periode 2024 – 2029. Demikianlah pengumuman ini saya buat dengan benar untuk diketahui khalayak ramai juga guna memenuhi syarat administrasi pencalonan saya.

Hormat Saya,
Hartono

TUJUH FRAKSI DPRD GROBOGAN SUSUN MATERI

Pemandangan Umum Raperda Penyertaan Modal

GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan mulai membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun anggaran 2024. Tujuh fraksi yang ada, yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PPP, Partai Hanura, Karya Sejahtera (Karsa), dan Fraksi Demokrat Amanat Berkarya (DAB), Selasa (4/7) malam, telah mengadakan rapat di ruang fraksi masing-masing untuk menyusun materi pemandangan umum atas raperda usulan Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM.

Menurut Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto SSos MAP, isi atau materi Pemandangan Umum yang telah disusun masing-masing fraksi akan disampaikan pada rapat paripurna ke-20. Sesuai jadwal yang telah diputuskan oleh Badan Musyawarah (Bamus), rapat paripurna ke-20 akan dilaksanakan pada Rabu (12/7), dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua berupa penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Dewan atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada BUMD tahun anggaran 2024.

Pemandangan Umum fraksi antara lain berisi pendapat, saran, pertanyaan, dan permintaan penjelasan berkaitan dengan materi raperda dimaksud, yang harus ditanggapi atau dijawab oleh bupati dalam forum rapat paripurna. Sesuai jadwal, jawaban bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi Dewan atas Raperda Penyertaan Modal Pemkab kepada BUMD tahun anggaran 2024 akan disampaikan pada rapat paripurna ke-21 pada Jumat (21/7) yang akan datang.

Sebelumnya, pada rapat paripurna ke-19, Selasa (4/7), bupati menjelaskan, dirinya mengajukan Raperda Penyertaan Modal Pemkab kepada BUMD dasarnya Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Tentang besarnya penyertaan modal disebutkan Rp 17,4 miliar untuk lima BUMD. Rinciannya, sebesar Rp 10 miliar untuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan perbankan dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif serta usaha menengah, kecil dan mikro, Rp 1 miliar untuk PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan untuk memperkuat kapasitas penjaminan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha, Rp 3,9 miliar untuk PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan yang akan dipergunakan untuk pengadaan mobil tangki air, penggantian water meter, pembangunan sumur air dalam dan pengadaan genset intake Sidorejo.

Kemudian sebesar Rp 1,5 milir untuk Perusda BPR Purwa Artha yang akan digunakan untuk peningkatan pelayanan perbankan dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif serta usaha menengah, kecil dan mikro, dan sebesar Rp 1 miliar untuk Perusda Purwa Aksara yang akan dipergunakan untuk peningkatan kapasitas produksi pada unit perdagangan dan unit percetakan.

"Saya berharap bantuan dan kerjasama yang baik dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga dapat kita setujui bersama untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah pada saatnya nanti," harap bupati. **(Tas)-f**

KR- M Taslim

DPRD Grobogan saat rapat paripurna penjelasan Bupati atas Raperda Penyertaan Modal Pemkab kepada BUMD.

Media Penyimpanan Online dan Offline

Krisnawati
Dosen Prodi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Amikom Yogyakarta

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

DATA merupakan hal penting dalam suatu organisasi. Bahkan sebagai orang pribadi pun kita pasti tidak lepas dari kepemilikan data. Data- data tersebut dapat berupa data teks, gambar, animasi, audio dan video. Bagi orang pribadi, apalagi bagi organisasi, data merupakan aset penting yang harus disimpan dengan baik. Saat ini ada banyak pilihan media penyimpanan data yang dapat digunakan.

Cloud storage merupakan media penyimpanan data yang saat ini banyak digunakan. Media penyimpanan terbaru ini merupakan media penyimpanan online yang memanfaatkan fasilitas koneksi internet untuk mengakses data. Ada banyak penyedia layanan cloud storage yang dapat digunakan mulai dari yang gratis sampai dengan yang berbayar. Cloud storage mempunyai banyak keuntungan. Data dapat diakses dimanapun dan menggunakan perangkat apapun asalkan terhubung dengan jaringan internet. Selain itu dimungkinkan tidak perlu biaya jika menggunakan fasilitas cloud storage gratis. Kalaupun menggunakan cloud storage berbayar, biayanyapun akan lebih murah dibandingkan jika harus menyediakan media penyimpanan sendiri. Dari sisi keamanan tentunya juga menguntungkan, kecil kemungkinan data akan hilang.

Selain media penyimpanan online, media penyimpanan offline juga masih perlu digunakan. Harddisk merupakan media yang lazim digunakan untuk menyimpan dokumen ketika tidak ditemui koneksi internet. Ketika ada koneksi internet pun, banyak yang menggunakan harddisk sebagai media penyimpanan dengan alasan kepraktisan. Setelah itu dokumen tersebut baru ditransfer ke cloud storage. Masih banyak tersedia juga media penyimpanan offline dengan kapasitas lebih kecil, salah satunya adalah flashdisk, walaupun jumlah penggunanya semakin lama semakin berkurang. Media ini kadang juga digunakan untuk transfer data, walaupun semakin banyak yang menggunakan fasilitas bertukar data/transfer data secara online. Saat ini sudah tersedia pula flashdisk dengan kapasitas besar, bahkan sampai hitungan terra.

Kelebihan media penyimpanan offline adalah tidak diperlukannya koneksi internet. Sedangkan media penyimpanan online memang membutuhkan koneksi internet untuk mengakses. Dengan demikian data yang disimpan di cloud storage menjadi lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk data yang relative kecil kapasitasnya, dapat menggunakan alternative cloud storage gratis jika ingin meniadakan biaya. Sedangkan untuk data yang kapasitasnya besar, dapat menggunakan cloud storage berbayar. Secara biaya masih lebih murah dibandingkan harus menyediakan penyimpanan offline. Cloud storage juga lebih aman dibandingkan dengan offline storage. Penyedia layanan cloud storage tentunya sudah menyediakan standar pengamanan terhadap data yang disimpan. Cloud untuk menyimpan aplikasi juga

Masing-masing media penyimpanan, baik online maupun offline tentunya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sampai saat ini keduanya masih ada dalam kapasitas saling melengkapi. Media penyimpanan online maupun offline digunakan bersama-sama bergantung pada kondisi yang dihadapi. Daerah-daerah yang kualitas koneksi internetnya masih kurang, media offline mau tidak mau merupakan satu-satunya pilihan. Media penyimpanan offline masih menjadi sarana penyimpanan default pada perangkat offline. Suatu saat media ini bisa jadi akan sepenuhnya digantikan cloud storage. Aplikasi komputer yang memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi pun sudah mulai banyak menggunakan cloud, dari yang gratis sampai berbayar. Alternatif ini juga bisa dipilih jika ada kendala spesifikasi hardware ketika menjalankan aplikasi tertentu. Untuk mengaksesnya cukup gunakan hardware standar dibawah spesifikasi yang diharuskan.

Kemudahan-kemudahan ini tentunya membawa konsekuensi bagi banyak pihak. Penyedia layanan cloud storage dan cloud computing berlomba-lomba memberikan penawaran terbaiknya. Sebagai pengguna, masyarakat juga ada banyak pilihan, yang sangat membantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. ***